

Disertasi

Relasi Kelompok Etnik Antar-Orang Kayo Pulau dengan Kelompok Etnik lainnya di Kota Jayapura Provinsi Papua

Inter-ethnic Relationship between Kayo Pulau Ethnic Group and Other Indigenous Ethnic Groups in Jayapura City of Papua Province

Hanro Yonathan Lekitoo

Disertasi dalam bidang Antropologi - Program Studi Antropologi Universitas Indonesia

Dipertahankan di hadapan Sidang terbuka Senat Akademik pada 9 Januari 2019

Di Kampus Universitas Indonesia, Depok.

E-mail: hanrolekitoo2018@gmail.com

ABSTRACT

The Kayo Pulau ethnic group and other indigenous ethnic groups in the Humboldt bay, Jayapura City are groups of ethnic groups that Keesing refers to as tribal communities, communities without a central economy and central politics. Those ethnic groups can be categorized as pre-industrial societies by Lewellen, with the type of society that Fried calls rank society. The history of the Second World War brought ethnic groups in the city of Jayapura immediately into the modern world, where the presence of the Japanese Army in 1942 and the Allies of 1944 opened various war infrastructures there. After the departure of the Dutch Government and Papua returned to Indonesia in 1963, until now Jayapura has become one of the most developed region and become a highly polyethnic region. The development and the diversity of Jayapura city make this city called Little Indonesia. The study of relations between ethnic groups in Kampung Kayo Pulau is conducted approximately 3 years, between 2015-2018. The research is done using ethnographic methods, with participatory observation techniques, interviews, and literature studies from various sources are used. The analysis process is done other than Kampung Kayo Pulau, is also raised to the level of Jayapura City and Jayapura Regency where the socio-cultural character of the population is similar. The main concept used in this study is the concept of ethnicity from Barth and Eriksen, where inter-ethnic relations are melting and constructive. However, the emphasis of Barth's concept is on the relations of individuals and families in an ecological and demographic perspective. Whereas Eriksen's is more on the historical context. The inter-ethnic relations of the Kayo Pulau people with other ethnic groups in Jayapura City, I look at four contexts, those are kinship, economy, politics and religion. In relation to these four contexts, the inclusive nature of Kayo Pulau and indigenous ethnic groups in Jayapura City which always seek equality and embrace other ethnic groups, are important values in maintaining a tolerant and harmonious life.

Keywords: Ethnic relations, construction, inclusive, kinship, economy, politics and religion.

ABSTRAK

Kelompok etnik Kayo Pulau dan kelompok etnik asli lainnya di teluk Humboldt, Kota Jayapura adalah rumpun kelompok etnik yang oleh Keesing disebut sebagai masyarakat tribal, masyarakat tanpa ekonomi sentral dan politik sentral. Kelompok etnik di sana dapat dikategorikan sebagai masyarakat *pra-industri* oleh Lewellen, dengan tipe masyarakat yang oleh Fried disebut *rank society*. Sejarah Perang Dunia Kedua membawa kelompok-kelompok etnik di Kota Jayapura segera masuk dalam dunia modern, di mana kehadiran Tentara Jepang 1942 dan Sekutu 1944 membuka berbagai infrastruktur perang di sana. Setelah hengkangnya Pemerintah Belanda, dan Papua kembali ke Pangkuan NKRI 1963, hingga kini Kota Jayapura menjadi salah satu daerah yang lebih maju dan sangat polietnik, oleh karena itu sering disebut sebagai Indonesia mini. Kajian mengenai relasi antar-kelompok etnik dilakukan di Kampung Kayo Pulau kira-kira tiga tahun lamanya, yakni 2015-2018. Penelitian dengan metode etnografi, di mana teknik observasi partisipasi, wawancara, serta studi literatur dari berbagai sumber digunakan. Analisis selain Kampung Kayo Pulau, juga diangkat ke tingkat Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura di mana



karakter sosial budaya penduduknya mirip. Konsep utama yang dipakai pada kajian ini adalah konsep etnisitas dari Barth dan Eriksen, di mana relasi antar-etnik bersifat mencair dan konstruktif. Namun demikian penekanan dari Barth lebih pada relasi individu dan keluarga dalam perspektif ekologi dan demografi. Sedangkan Eriksen lebih kepada konteks kesejarahan. Dalam kaitan relasi antar-etnik orang Kayo Pulau dengan kelompok etnik lainnya di Kota Jayapura, saya mencermati empat konteks, yakni kekerabatan, ekonomi, politik dan keagamaan. Dalam kaitan dengan keempat konteks tersebut, sifat inklusif orang Kayo Pulau dan kelompok-kelompok etnik asli di Kota Jayapura yang mana selalu mencari persamaan dan merangkul kelompok etnik lainnya, merupakan nilai-nilai penting dalam mempertahankan kehidupan yang toleran dan harmonis.

Kata Kunci: Relasi etnik, konstruksi, inklusif, kekerabatan, ekonomi, politik dan keagamaan.

PENDAHULUAN

Studi mengenai etnisitas bukanlah hal yang baru dalam dunia antropologi. Sudah banyak kajian mengenai etnisitas yang dilakukan oleh sejumlah ahli. Hal yang pasti bahwa etnisitas tidak dapat dipisahkan dari masalah identitas, dan identitas yang memberikan referensi mengenai *self* dan *other* dimaksud muncul akibat perjumpaan atau kontak antar satu kelompok dengan kelompok masyarakat manusia lainnya. Artikel ini mengenai relasi antar-kelompok etnik yang melibatkan dua atau beberapa kelompok etnik yang berbeda di teluk Humboldt, Kota Jayapura. Menariknya, relasi antar-etnik itu sendiri bisa muncul dalam berbagai dimensi, seperti kekerabatan, ekonomi, politik, dan keagamaan.

Mencermati kondisi terakhir di Provinsi Papua dan Papua Barat, terutama pada Agustus dan September 2019¹ di mana terjadi konflik yang menjurus pada isu SARA. Tulisan ini mencoba melihat sisi lain dari kehidupan orang Papua di mana hubungan antar-kelompok etnik yang hidup saling menghormati, berdampingan dan tolong menolong. Lebih jauh artikel mencoba mencermati proses dari relasi antar-kelompok etnik, dan bagaimana konteks kekerabatan, ekonomi, politik, dan keagamaan bekerja mewarnai relasi antar-etnik tersebut. Adapun dimensi dalam proses relasi antar-etnik, akan difokuskan pada pada tiga kategori golongan etnik di Kota Jayapura, yakni kelompok etnik lokal di wakili oleh etnik Kayo Pulau, kelompok etnik Papua (non-lokal), oleh etnik Serui-Ambai dan kelompok etnik non-Papua oleh orang Buton dari Sulawesi Tenggara. Argumen saya,

¹ Asal muasal konflik di Tanah Papua dipicu oleh masalah penghinaan bernada rasis kepada kelompok mahasiswa asal Papua yang sedang menuntut ilmu di Surabaya dan Malang.

relasi antar-orang Kayo Pulau dan kelompok etnik lainnya ditentukan oleh nilai-nilai yang ada dan dinegosiasikan dalam konteks kekerabatan, ekonomi, politik, dan keagamaan.

Di era Otonomi Khusus bagi Papua, lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sepertinya, ada ruang yang tertutup bagi “orang luar” untuk hidup dan berkarya di tempat-tempat yang dinyatakan milik suatu kelompok etnik. Apalagi dengan isu “kePapuaan” di mana adanya keutamaan pada orang asli. Ada kesan identitas kePapuaan menafikan kemajemukan dan mengabaikan orang-orang non-Papua atau orang-orang bukan suku asli di kota/kabupaten setempat. Namun artikel ini, menyajikan gejala yang tampak berbeda, karena penduduk asli, ternyata memberikan “ruang” lewat relasi antar-etnik kepada “orang luar” untuk hidup dan beraktifitas, baik dalam konteks kekerabatan, ekonomi, politik dan keagamaan. Adapun sajian artikel ini mengenai relasi antar-kelompok etnik di Kota Jayapura, sebagai berikut : (1) Mendiskripsikan proses dinamika etnisitas yang terjadi di Papua, dengan menggunakan kelompok-kelompok etnik lokal asli di Kota Jayapura dan penduduk migran yang hadir di situ; (2) Menggambarkan bagaimana relasi sosial (*social relation*) menjadi dasar bagi proses inklusi antar-kelompok-kelompok etnik lokal dengan kelompok-kelompok etnik pendatang.

PARADIGMA

Dalam kajian mengenai relasi antar-kelompok etnik yang majemuk, saya menggunakan istilah masyarakat polietnik seperti yang digunakan oleh Eriksen (2010) dan Cohen (1982). Hal ini karena,

komunitas Kayo Pulau dan Kota Jayapura adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari banyak latar belakang, kebudayaan dan etnik. Pada kajian etnisitas, konsep masyarakat majemuk memiliki banyak makna. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai *plural society*, akan tetapi jika diterjemahkan masyarakat mejemuk menjadi *plural society* tidaklah tepat, untuk konteks Kayo Pulau dan Kota Jayapura. Oleh karena *plural society* menurut Furnivall adalah hidup berdampingan, tetapi tidak membaur. Sedangkan kondisi yang menggambarkan keragaman etnik dan budaya di Kayo Pulau, lebih mirip dengan apa yang disebut Eriksen dan Cohen dengan *polyethnic society*. Untuk itulah saya akan menggunakan istilah polietnik untuk mendiskripsikan susunan masyarakat di Kayo Pulau dan Kota Jayapura.

Eriksen, (2010:23&46), etnisitas pertamanya adalah fakta mengenai penerapan perbedaan-perbedaan secara sistematis antar-*insider* dan *outsider*, antara kita dan mereka. Jika tidak ada prinsip pembedaan demikian, maka tidak akan ada etnisitas, karena etnisitas mensyaratkan sebuah hubungan institusional antara kategori-kategori yang digambarkan yang menganggap anggota-anggota satu dengan lainnya berbeda secara kultural. Baginya, etnisitas sesungguhnya dinyatakan melalui kontak sosial. Selanjutnya dikatakan Eriksen, batasan-batasan etnik tidak perlu terjebak pada batasan-batasan teritorial karena berkaitan dengan ikatan sosial. Tidak ada pemisahan kelompok-kelompok secara keseluruhan, karena adanya suatu aliran informasi yang terus menerus, interaksi, pertukaran dan bahkan kadang-kadang lintasan orang.

Sedangkan batasan kelompok-kelompok etnik menurut Barth (1988:16), hal ini tertuju pada pandangan mengenai batas kelompok etnik, bukan pada sifat-sifat budaya di dalamnya. Dan batasannya tentunya merupakan batasan sosial, walaupun mungkin juga menyangkut batasan wilayah. Kelompok etnik bukan semata-mata ditentukan oleh wilayah yang didudukinya, lebih dari itu, batas etnik menyalurkan kehidupan sosial; batas ini sering merupakan tatanan perilaku dan hubungan sosial yang amat kompleks. Bagaimana kita mengerti bentuk akhir dari

suatu pelestarian batas di mana kelompok dan unit budaya berada. Dalam pelestarian batas etnik terdapat situasi kontak sosial antara orang-orang dengan budaya yang berbeda. Tetapi bila orang-orang dengan budaya yang berbeda berinteraksi memerlukan dan membentuk kesatuan tanda dan nilai, dengan kata lain harus ada budaya yang sama atau umum. Jadi kelompok-kelompok etnik yang tetap mengadakan kontak ini tidak hanya menunjukkan adanya kriteria dan tanda untuk identifikasi, tetapi juga membentuk struktur interaksi yang memungkinkan menetapnya perbedaan-perbedaan budaya.

Sedangkan, konsep etnisitas menurut Eriksen 2010 dan Barth 1988, di mana identitas etnik adalah sebuah konstruksi sosial sebagai akibat dari relasi sosial, dan tidak terbatas pada teritorial. Selain itu, karakter etnik bersifat mencair dan bisa dinegosiasikan, di mana seseorang kemungkinan memiliki banyak diri (*selves*). Yang menarik, identitas etnik sebaiknya dilihat pada 'route' (perjalanan) dan bukan pada 'roots' (asal usul). Mencermati pendapat kedua ahli di atas, maka konsep mereka mengenai etnisitas dapat dipandang menjawab persoalan-persoalan dan perkembangan etnik di dunia modern dewasa ini. Untuk itu pada kajian ini saya akan menggunakan konsep etnisitas berdasarkan pendapat Barth dan Eriksen. Hal mana, kedua teori di atas yang sifatnya mencair dan bisa dinegosiasikan sesuai dengan sifat orang Kayo Pulau dan penduduk asli Kota Jayapura lainnya yang *apolonian* (memiliki watak yang tenang, selaras, suka damai, dan suka mencari jalan tengah), serta bersifat *inklusif* (selalu mencari persamaan dan merangkul) merupakan sifat kelompok etnik yang mencair dan bersifat konstruktif.

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Kajian relasi antar-kelompok etnik dilakukan di lingkup orang Kayo Pulau dan kelompok etnik pendatang lainnya di Kota Jayapura, dan tidak terlepas dari 9 kampung asli lainnya, yang terdiri dari 12 keondoafian, serta terbagi dalam 3 rumpun utama². Secara khusus Kota Jayapura menjadi lokasi kajian relasi antar-etnik, karena

² (1). Rumpun Tobati, Kayo Pulau, Kayo Batu, termasuk Ormu) (2). Rumpun Sentani (Nafri;Yoka dan Waena)

kota tersebut adalah pusat pemerintahan (ibukota Provinsi Papua), juga sebagai pusat ekonomi, pusat aktivitas politik dan pusat pendidikan. Akibat dari ketersediaan prasarana dan sarana yang lebih memadai dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Papua, daerah ini kemudian didatangi banyak etnik, baik kelompok-kelompok etnik dari daerah-daerah lain di Papua, maupun dari daerah-daerah di luar Papua.

Kelompok etnik Kayo Pulau dan kelompok-kelompok etnik asli lainnya di Kota Jayapura adalah kelompok-kelompok etnik pemilik Kota Jayapura. Kelompok-kelompok etnik dimaksud memberi tempat kepada sejumlah etnik lainnya, seperti Buton, Toraja, Sangir, Maluku, Jawa, dan sebagainya yang adalah migran non-Papua di satu sisi, dan etnik Serui, Ambai, Dani, Mee, Biak, Maybrat, dan lain-lain yang adalah migran asli Papua di sisi lainnya. Kini kelompok-kelompok etnik migran tersebut telah hidup di sana puluhan tahun lamanya. Mereka hidup saling memberi dan menerima dengan etnik asli di situ, meski diterjang berbagai isu identitas. Oleh karena itulah meskipun tulisan ini fokusnya di kampung Kayo Pulau, serta analisisnya berdasarkan pada kasus-kasus di sana. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hal-hal yang terjadi di Kayo Pulau, dalam banyak hal juga terjadi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Provinsi Papua umumnya. Hal mana dapat dikatakan, apa yang terjadi di Kayo Pulau tidak lepas dari berbagai isu besar yang terjadi di Papua³.

Kota Jayapura dan Orang Kayo Pulau

Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Kota Jayapura ketika itu menjadi penting dan menjadi pusat pemerintahan New-Guniea Belanda di Papua. Kini Kota Jayapura sudah menjadi Kota modern dan menjadi daerah yang sangat polietnik, bahkan penduduk aslinya jika dibandingkan dengan kelompok etnik pendatang hanya sekitar 3,71 persen. Berbagai infrastruktur di Kota Jayapura cukup tersedia dengan baik

(3) Rumpun Skouw Sae; Skouw Mabo, Skouw Yambe termasuk Moso (Nyao).

³ Orang Kayo Pulau dan etnik asli di Kota Jayapura adalah bagian dari wilayah budaya Tabi. Dapat dikatakan psikokultural etnik di daerah ini lebih bersifat apolonian, suka berdamai, dan suka mencari jalan tengah.

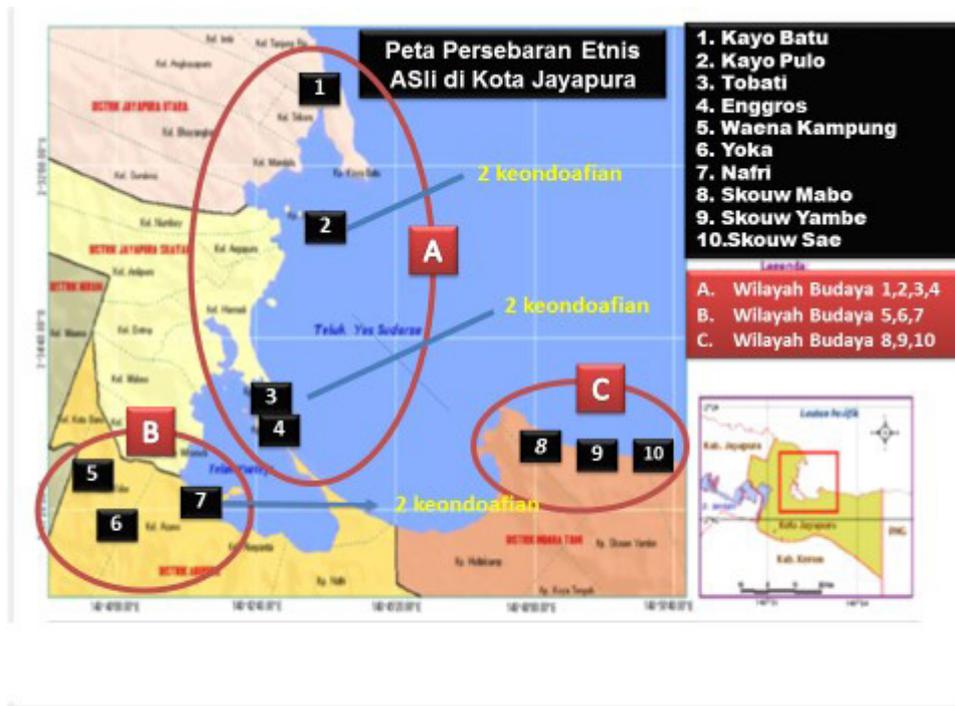
mulai dari pendidikan, kesehatan, perniagaan dan transportasi. Salah satu ikon Kota Jayapura yang sedang dibangun dan direncanakan selesai pada 2019 adalah jembatan Hamadi – Holtekan yang panjangnya 732 meter. Jembatan ini adalah jembatan terpanjang di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat).

Kampung orang Kayo Pulau, terletak di distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Kampung tersebut dalam pemerintahan Kota Jayapura disebut Kampung Tahima Soroma, salah satu dari sepuluh kampung asli di Kota Jayapura.

Namun demikian, dalam tulisan ini saya lebih suka menggunakan sebutan orang Kayo Pulau, hal ini karena umumnya penduduk setempat lebih suka menggunakan sebutan Kampung Kayu Pulau atau Kayo Pulau. Bukan hanya dua nama tersebut saja, kampung ini sering juga disebut dengan nama kampung Kayu Injau, Chrengchreng, Pisiusaiba dan Entsyau. Adapaun di kampung Kayo Pulau terdapat empat klen, yakni klen Sibi, Youwe, Haay dan Soro. Klen-klen tersebut sering disebut dengan menggunakan suku⁴. Menurut informasi sekretaris kampung Kayo Pulau, Berthus Pui, jumlah keseluruhan orang Kayo Pulau, baik yang hidup di Kampung Kayo Pulau, maupun di luar kampung di sekitar Kota Jayapura dan di luar Kota Jayapura berkisar antara 700 - 800 orang.

Dahulu orang Kayo Pulau-lah pemilik seantero tempat yang kini menjadi pusat Kota Jayapura, yakni pusat ekonomi, pemerintahan, pendidikan, dan politik. Namun, kini mereka hidup di sebuah pulau kecil berukuran kira-kira 6400 meter persegi yang terletak di depan pusat Kota Jayapura. Di pulau kecil ini terdapat dua keondoafian (pemerintahan adat), yakni keondoafian dari klen Sibi dan keondoafian dari klen Youwe. Selain terdapat dua orang ondoafi, keempat klen masing-masing memiliki kepala-kepala klen (kepala suku). Berbeda dari sebagian besar suku di Papua yang bersifat egaliter dan memiliki sistem politik *big man*, orang Kayo Pulau dan kelompok etnik di sekitar Teluk Youtefa dan Humboldt, di mana dalam sistem

⁴ Seperti sering terdengar mereka menyebut klen-klen dengan sebutan suku-suku, yakni suku Sibi, suku Youwe, suku Haay dan suku Soro. Namun sesungguhnya sebutan suku di sini maksudnya adalah klen.



Gambar Peta. Kota Jayapura dapat dibagi lagi dalam 3 wilayah budaya, 10 kampung asli dan 12 keondoafian. Dari 10 kampung asli, 3 kampung, yakni : Kayo Pulau, Tobati, dan Nafri masing-masing memiliki 2 keondoafian. Sedangkan 6 kampung lainnya masing-masing hanya terdapat 1 keondoafian. Sedangkan kampung Enggros tidak memiliki keondoafian melainkan dibawah keondoafian Hamadi dari kampung Tobati. (lihat pembagan pada peta di atas).

pemerintahan adatnya, seorang pemimpin, yakni *ondoafi* memperoleh kedudukan melalui pewarisan (*ascribed status*).

Orang Kayo pulau hidup berdampingan dengan kelompok suku-suku asli lainnya di teluk Humboldt dan Youtefa, yakni orang Tobati, orang Kayo Batu, orang Nachaiba dan Teisarau (Ormu), di mana kelompok-kelompok tersebut dianggap serumpun. Selain itu ke arah selatan dan timur di sekitar teluk Humboldt juga ada orang Nafri dan orang Skouw yang pada waktu dahulu memiliki hubungan dagang dan perkawinan. Orang Kayo Pulau dan kelompok suku lainnya di teluk Humboldt dan Youtefa juga memiliki hubungan dengan kelompok suku di danau Sentani terutama dalam hal kekerabatan dan perdagangan. da kelompok suku di PNG, seperti di sekitar

Hubungan kekerabatan orang Kayo Pulau boleh dikatakan tergolong luas karena sampai pada kelompok suku di PNG, seperti di sekitar Vanimo, Waromo dan Lido. Pada tahun 2016 saya pernah ke sana bersama kepala Suku Frans Sibi, dan saya melihat banyak kuburan-kuburan

asal orang Kayo Pulau di sana. Hubungan itu kelihatan juga di mana ketika *ondoafi* Gasper Sibi wafat pada 2014, banyak kerabat dari Waromo, Lido, Aitape di PNG yang datang melayat ke rumah duka di Kampung Kayo Pulau. Di kampung-kampung seperti Waromo, Lido dan Aitape di PNG setiap klen dari Kayo Pulau dan juga klen-klen dari kelompok etnik lainnya di teluk Youtefa dan teluk Humboldt Kota Jayapura, umumnya memiliki tempat menambat perahu di sana. Nampak jelas menunjukkan hubungan kekerabatan yang erat dari mereka yang hidup Kota Jayapura dan yang hidup di wilayah Papua New Guinea.

Salah satu falsafah hidup orang Kayo Pulau yang terkenal adalah *aifane nafane chrengchreng mutugu*, artinya pulau yang tidak ada air minm, dan tidak ada kayu bakar. Namun demikian, mereka tidak pernah menolak siapapun yang datang ke pulau kecil tersebut untuk meminta pertolongan atau bantuan. Hal ini terbukti, hingga saat ini mereka hidup saling berdampingan, saling menerima dan menghargai dengan berbagai etnik lain yang hadir di Kota Jayapura.

Kebahasaan

Salah satu bahasa di Papua yang tergolong nyaris punah adalah bahasa orang Kayo Pulau. Hanya sekitar 6 orang tua⁵ di kampung tersebut yang dapat berbahasa asli dengan fasih. Sedangkan pemuda dan anak-anak di situ mugkiin dapat berbicara sedikit atau hanya bisa mendengar saja bahasa Kayo Pulau. Jadi lebih pada kemampuan berbahasa secara pasif. Orang Kayo Pulau menghitung hingga hitungan ke-24, namun sayangnya generasi sekarang hanya bisa menghitung sampai angka enam dan selanjutnya angka 24, yakni : yakni “*tae* (1), *roti* (2), *toru* (3) *awa* (4), *menema* (5), *marotima* (6) dan *nrigitai* (24). Ungkapan selamat pagi, siang, sore dan malam disampaikan sebagai berikut : selamat pagi, *raisma wane*, yang dapat diartikan “pagi - bagus”. Selamat Siang, *rena wane* yang dapat diartikan siang – bagus. Selamat Sore, *vndare Wane*, artinya Sore –bagus. Dan selamat malam, *vonni wane*, artinya malam-bagus.

Beberapa kalimat sederhana, dalam pola subyek, predikat dan obyek terlihat pada kalimat-kalimat di bawah ini :

Bahasa Kayo Pulau	Bahasa Indonesia
<i>Noho nahi wantre</i>	Saya papeda makan
<i>Noho viau wantre</i>	Saya <i>siapu</i> makan
<i>Noho mak'hara wantre</i>	Saya keladi makan
<i>Noho Ori wantre</i>	Saya pisang makan

Adapun struktur kalimat di atas, jika dicermati seperti pendapat Ajamiseba (Koentjaraningrat 1994:119), tergolong dalam struktur bahasa-bahasa *phylum*⁶ atau fila non-Melanesia atau bahasa-bahasa khas Papua. Hal ini terlihat dari struktur kalimatnya yang bukan subyek-predikat-obyek (SPO), tetapi subyek-obyek-predikat (SOP).

⁵ Informasi dari Bapak Hosea Youwe (almarhum) pada tahun 2014. Bapak Hosea Youwe adalah salah satu dari orang tua yang ketika itu masih fasih berbahasa asli Kayo Pulau. Ia meninggal pada tahun 2018.

⁶ Di Papua terdapat dua *phyllum* (fila) bahasa, yakni fila bahasa-bahasa Melanesia dan fila bahasa-bahasa non-Melanesia.

Kependudukan

Jumlah penduduk pada umumnya dan penduduk asli Kayo Pulau tahun 2017

No.	Jumlah penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Penduduk Umumnya	338	263	601
2.	Penduduk Asli	83	65	148

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Jayapura 2017 dan Dukcapil Kota Jayapura 2017

Jumlah keseluruhan penduduk kampung Kayo Pulau menurut data statistik Kota Jayapura Tahun 2017 berjumlah 601 orang. Sedangkan jumlah penduduk asli yang hidup di kampung Kayo Pulau pada tahun 2017 menurut Dinas Kependudukan dan catatan Sipil adalah sebesar 148 orang. Dengan demikian jumlah penduduk asli Kayo Pulau sebesar 24,6 persen, yang terdiri dari 24,5 persen laki-laki dan 24,7 persen perempuan.

Jumlah penduduk terbesar di Kampung Kayo Pulau (Tahima-Soroma) adalah orang Buton dari Sulawesi Tenggara yang kini menempati Pulau Kosong (*Muturau mutugu*). Mereka sudah hidup di situ sejak tahun 1968. Selain itu, ada juga suku-suku Papua lainnya, seperti orang Serui-Ambai, yang hidup di sekitar Tanjung Kamboja RW 01 Kayo Pulau (Tahima-Soroma).

Menarik, di mana Pulau Kosong yang menjadi salah satu rukun wilayah (RW II) dari kampung Kayo Pulau diberikan sebagai tempat hunian bagi orang Buton dari Sulawesi Tenggara. Meskipun orang Kayo Pulau sendiri mengalami kesulitan tempat untuk bermukim, tetapi karena persahabatan dan persaudaraan, membiarkan orang Buton di Pulau Kosong tinggal tanpa membayar sepeserpun selama lebih 50 tahun. Bukan hanya dengan orang Buton di Pulau Kosong, tetapi juga wilayah Argapura Pantai (kampung Vietnam) di mana orang Serui-Ambai dari Pulau Yapen Papua telah menetap di situ 40 tahun lebih lamanya, sejak tahun 1974 tanpa membayar sepeser-pun. Demikianpun, daerah sekitar Bhayangkara yang telah dihuni oleh orang Dani dan Mee dari wilayah Pegunungan Tengah Papua sejak tahun 1980-an.

Tabel 4.1. Jenis pekerjaan penduduk di 4 kampung di teluk Humboldt dan Youtefa Tahun 2017

No.	Jenis Pekerjaan	Kayo Pulau	Kayo Batu	Tobati	Enggros
01.	Tidak/Belum Bekerja	59	93	69	153
02.	Mengurus Rumah Tangga	20	35	31	49
03.	Pelajar/Mahasiswa	30	60	57	79
04.	Pensiunan	2	4	2	2
05.	Pegawai Negeri Sipil	13	17	6	69
06.	TNI	2	1	1	-
07.	Kepolisian	-	1	-	1
08.	Peternak	1	-	1	-
09.	Nelayan	5	10	23	46
10.	Karyawan Swasta	8	10	5	4
11.	Buruh Nelayan	4	-	-	7
12.	Pembantu Rumah Tangga	-	-	-	-
13.	Sopir	-	1	-	-
14.	Wiraswasta	4	8	6	11
15.	Pedagang	-	-	-	-
16.	Petani	-	-	-	-
17.	Tukang jahit	-	-	-	1
18.	Pendeta	-	-	-	2
19.	Anggota DPRD	-	-	-	1
20.	Pelaut	-	-	-	2
21.	Perangkat desa	-	-	-	1
	J U M L A H	148	240	201	428

Dahulu secara tradisional orang Kayo Pulau melakukan aktivitas menangkap ikan, meramu, berburu dan bercocok tanam. Namun demikian, setelah Kota Jayapura berubah wajah menjadi hutan-hutan beton, aktivitas mata-pencaharian tradisional orang Kayo Pulau boleh dikatakan hilang hampir 100 persen. Pekerjaan meramu, berburu dan bercocok-tanam sudah tidak mungkin dilakukan sama sekali karena tanah-tanah dan hutan mereka sudah beralih fungsi. Meskipun nelayan masih menjadi salah satu mata-pencaharian hidup, namun bukan untuk alasan komersial, namun untuk dikonsumsi sendiri.

Situasi masyarakat polietnik teluk Humboldt dan Youtefa mirip dengan konsep Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-Beda Tetapi Tetap Satu), konsep yang sama tercermin dalam moto Kota Jayapura sekarang : “*Hen Tecahi, Yo Onomi Tmar Ni Hanased*”, yang artinya : “Satu Hati Membangun Kota Untuk Kemuliaan Tuhan”. Moto tersebut didasarkan atas kearifan lokal masyarakat asli di Teluk Humboldt dan Youtefa, di mana ketika masa awal membentuk kelompok-kelompok yang kini menjadi kelompok etnik asli di Kota Jayapura. Kelompok etnik di situ memiliki budaya damai yang khas “*mrec* : Damai di Bawah Ketiak Ondoafi”. Semua ini menjadi faktor-faktor integratif yang sejuk bagi orang di teluk Humboldt dan Youtefa di mana menjadi

budaya yang membawa Kota Jayapura sebagai kota yang aman dan damai.

Meskipun faktanya kehidupan damai itu tidak selalu berjalan mulus, di sana-sini masih ada riak-riak protes dan ungkapan ketidakpuasan atas sejumlah hal. Namun semuanya bisa normal kembali dan jalan dengan damai. Seperti gambaran di mana masyarakat polietnik di Jayapura mendapat ujian. Hal ini terlihat dari kehidupan umat beragama di Kota Jayapura yang terganggu karena terjadi dua isu intoleran di awal tahun 2018. Pertama adalah khotbah ustaz Garamatan yang viral di medsos yang dianggap sebagai penistaan orang asli Papua dan agama Kristen yang dianut oleh sebagian besar orang asli Papua. Kedua, Pembangunan menara masjid Al-Aqsa di Kota Sentani Kabupaten Jayapura.

Pada Agustus dan September 2019 ketika terjadi konflik karena isu SARA, Sang Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano (BTM)⁷, pencetus moto Kota Jayapura : *Hen Tecahi Yo Onomi Tmar Ni Hanased*⁷ (Bersatu Membangun Kota Untuk Kemuliaan TUHAN) dengan cepat menginisiasi deklarasi damai, pada 19 September 2019 di Kompleks Lantamal X Jayapura dengan mengundang sejumlah pihak, yakni Formkopimda, paguyuban dari suku-suku yang hidup di Kota Jayapura, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan se-Kota Jayapura. Sang Walikota mengatakan : “kita semua bersaudara yang Muslim, Hindu, Budha Kristen dan Katolik semuanya beribadah kepada Tuhan, kita ini bersaudara, biarlah damai itu ada di Kota Jayapura yang kita cintai bersama, marilah kita bangun Kota Jayapura dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Cepos, 9-10, 20-09-2019). Sebagai seorang putera asli teluk Homboldt dan Youtefa Kota Jayapura, ia selalu menghimbau untuk menjaga kedamaian dan persaudaraan di “rumah besar”, Kota Jayapura. Ia tidak hanya menghimbau, namun ketika konflik horizontal antar-pendemo dan pihak warga sipil, pada 19 Agustus 2019 lalu terjadi, ia datang ke lokasi konflik untuk melerai kedua kelompok yang sudah berhadap-hadapan saling menyerang.

⁷ Ia adalah anak adat dari kampung Tobati, sebuah kampung asli di teluk Youtefa di Kota Jayapura. Kini ia menduduki posisi walikota Jayapura untuk kedua kalinya (2017-2022).

KONTEKS RELASI ANTAR-KELOMPOK ETNIK

Menarik bahwa di tengah masyarakat polietnik yang memunculkan perdebatan, Kota Jayapura tetap terlihat aman dan kondusif. Pertanyaannya, kenapa orang Papua yang umumnya diidentikkan dengan “karakter responsif dan cepat emosi” tidak menjadi ancaman terhadap kota ini. Ketika sumber daya alam, dan lahan penduduk asli untuk hidup sudah tidak dimilikinya. Mereka menjadi termarginal dan bahkan teralienasi di atas tanah leluhurnya sendiri. Kini jumlah mereka sangat kecil, di mana penduduk asli Kota Jayapura pada 2017 hanya 3,71 persen. Di tengah situasi kritis bagi mereka, modal kearifan lokal, yakni membangun relasi antar-etnik untuk berbagai kepentingan, baik dalam konteks kekerabatan, ekonomi, politik dan keagamaan berperan penting.

Kearifan lokal dalam pembentukan komunitas

Menurut Lewelen (2003:166-168), dengan mengutip pendapat Tambiah, bahwa etnisitas adalah sebuah kesadaran diri dan identitas yang disuarakan yang bersifat substansial dan naturalis dengan satu atau lebih atribud, biasanya menyangkut warna kulit, bahasa, religi dan teritorial, serta hal-hal yang melekat secara kolektif sebagai milik bersama dan memiliki warisan sejarah mite. Adapun komponen penting adalah gagasan-gagasan yang diwariskan nenek moyang bagi keturunannya, di mana terdapat sebuah teritorial sebagai tempat asal-usul dan sekurang-kurangnya perasaan bersama sebagai satu kekerabatan.

Demikian pun historis orang Kayo Pulau dan rumpun etnik lainnya di Kota Jayapura, baik mengenai waktu kedatangan, ceritera bagaimana awal mula mereka bertemu, dan kemudian membentuk komunitas bersama sangat beragam. Namun demikian, hal yang menarik bahwa mereka semula bukannya suatu entitas kelompok yang tunggal yang datang kemudian menduduki dan mendiami suatu wilayah tertentu. Sebagai contoh, orang Kayo Pulau yang kini terdiri dari empat klen, yakni Sibi, Youwe, Haay dan Soro datang dalam waktu yang berbeda-beda. Menurut

ceritera, Sibi datang lebih dulu, kemudian datanglah Haay dan Soro. Ketiga klen ini hadir lebih dulu, lantas terakhir Youwe. Meskipun Youwe hadir paling terakhir, namun diberikan tempat istimewa di mana Klen Youwe diberi hak mempunyai keondoafian tersendiri, dan bukan di bawah keondoafian Sibi.

Lebih jauh jika mengacu pada pendapat Eriksen, bahwa etnisitas umumnya lebih memperhatikan identitas mengenai “us” (kita). Katanya, etnisitas pertama-tama mengacu pada fakta mengenai penerapan perbedaan secara sistematis antar-*insider* dan *out-sider*, antara kita dan mereka. Jika tidak ada prinsip perbedaan, maka tidak akan ada etnisitas, karena etnisitas mensyaratkan adanya hubungan institusional antara kategori-kategori yang digambarkan yang menganggap anggota-anggota satu dengan lainnya berbeda secara kultural. Adapun etnisitas sesungguhnya dinyatakan melalui kontak sosial. Eriksen menyangga batasan-batasan etnik yang terjebak pada teritorial, karena yang penting di sini adalah ikatan sosialnya.

Jika mencermati pendapat kedua ahli di atas, maka secara historis kelompok-kelompok etnik yang sekarang terbentuk sebagai entitas etnik suku-suku asli Port-Numbay (Kota Jayapura), awal proses pembentukannya sebenarnya bukan karena alasan teritorial, seperti yang dijelaskan Lewellen, melainkan karena relasi sosial dari ikatan-ikatan sosial yang ada. Hal tersebut bisa dicermati dari bagaimana mereka yang terbentuk bukan karena kesadaran teritorialnya melainkan karena relasi sosial yang terjalin dan memiliki komitmen bersama membentuk suatu komunitas hingga kini.

Merajut kebersamaan dalam kehidupan masyarakat yang polietnik

Etnisitas menurut Eriksen (2010:215) pada hakekatnya memperoleh bentuk-bentuk yang berbeda dan mungkin juga muncul dari situasi sejarah yang berbeda. Sebagaimana Ger Baumann (1999) mengatakan, semua identitas adalah bagian dari identifikasi, demikianpun David McCroner mengatakakan ‘identitas seharusnya dilihat sebagai suatu hal mengenai “route” (perjalanan) dari pada “roots (akar/asal-usul),

sebagai peta-peta untuk masa depan dari pada jejak-jejak dari masa lampau.

Barth (1988) memandang kelompok etnik sebagai unit-unit kebudayaan dan kelompok etnik sebagai suatu tatanan. Baginya hubungan antar-kelompok etnik yang dinamis dapat dilihat pada studi akulturasi, selain itu perlu kajian mengenai etno-histori, hal ini sebagai akibat bahwa pembentukan suatu budaya sesungguhnya amat beragam, terutama dalam hal pertambahan maupun perubahan budaya. Kelompok etnik bukan semata-mata ditentukan oleh wilayah, teritorial. Akan tetapi, batasan etnik meliputi batasan sosial yang bersifat sangat kompleks.

Kehidupan masyarakat yang polietnik di Kota Jayapura dan sekitarnya tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis, artinya tidak selalu baik-baik saja. Namun demikian jika kondisi kurang harmonis mendera kemajemukan, tidak juga sampai pada sebuah konflik yang fatal. Hal ini sebagaimana terjadi pada beberapa fenomena di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu.

Kasus penistaan agama misalnya, meskipun beberapa kali terjadi demonstrasi meminta agar si penista agama ditangkap dan diadili, namun tidak terjadi konflik yang berarti. Bahkan hingga hari ini meskipun si penista agama belum juga ditangkap dan diadili, namun tidak terjadi konflik atau demo berjilid-jilid memaksakan kehendak. Anak asli Port-Numbay (Kota Jayapura) yang juga sebagai pemimpin Kota Jayapura, Dr. Benhur Tomi Mano, MM, dalam berbagai kesempatan terus mengumandangkan hidup toleran, aman dan damai di atas tanah kelahirannya. Ia mengatakan bahwa Kota Jayapura merupakan salah satu kota yang paling aman di Indonesia, meskipun warganya sangat mejemuk. Namun tetap menjunjung toleransi antar-sesama.

Persoalan lainnya mengenai pembangunan menara mesjid di Kota Sentani dan kemudian menjadi perdebatan, hingga Menteri Agama Lukman Hakim turun tangan meminta agar pemerintah daerah dan para pemimpin umat dapat menyelesaikan dengan aman dan damai. Situasi yang cukup panas dan menimbulkan ketegangan antar-umat beragama, ternyata bisa diselesaikan dengan bijak oleh Bupati Matius Awaitouw

seorang anak asli Sentani, dengan membentuk tim mediasi konflik pembangunan menara mesjid dan meminta orang luar tidak banyak mencampuri masalah di Kabupaten Jayapura itu.

Relasi sosial tidak hanya terjadi di kalangan umat yang seagama saja, relasi sosial antar-umat beragama juga dibangun sebagai bagian dari kerukunan hidup beragama. Hal ini sebagaimana, terjadi ketika perayaan Natal, saudara-saudara kaum Muslim datang ke gereja menyampaikan salam natal dan memberikan setangkai bunga sebagai simbol ucapan. Demikian pun, ketika hari raya umat Muslim, para pemuda gereja di Kota Jayapura, datang menjaga keamanan di situ dan mengatur arus lalu lintas di tempat ibadah, terutama ketika Sholat Id, yang berlangsung di tanah lapang.

Relasi sosial juga dibangun pada struktur pemerintah Kota Jayapura, di mana duet walikota dan wakil walikota yang mencerminkan nilai-nilai kemajemukan. Tidak hanya orang asli Port-Numbay, atau orang Papua saja, atau orang Kristen saja, tetapi ada orang Bugis beragama Muslim sebagai wakil walikota. Demikianpun struktur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pada tingkat distrik dan kelurahan mencerminkan polietnik, di mana hampir semua suku bangsa dan agama di Indonesia terwakilkan di Kota tersebut.

Relasi sosial antara sesama rumpun suku-suku asli, dengan sesama orang Papua lainnya yang datang di situ maupun antar-migran luar Papua yang datang dan menetap di situ memberikan pemahaman baru mengenai etnisitas, yang bukan kaku sebatas teritorial dan asal-usul, melainkan jalinan, dan rajutan relasi sebagai sebuah entitas etnik yang harmonis, aman dan damai.

Relasi antar-kelompok etnik dan kepentingannya

Menurut Barth (1988) dalam hal pandangan mengenai batasan kelompok etnik di mana kelompok etnik tidak semata-mata ditentukan oleh wilayah yang didudukinya, lebih dari itu batasan etnik menyalurkan kehidupan sosial. Batas ini sering merupakan tatanan perilaku dan hubungan sosial yang amat kompleks, di mana

terdapat situasi kontak sosial antara orang-orang dan budaya yang berbeda. Namun demikian orang-orang dengan budaya yang berbeda berinteraksi memerlukan dan membentuk kesatuan tanda dan nilai, dengan kata lain harus ada budaya yang sama atau umum.

Pendapat Barth di atas memperkuat kajian ini bahwa orang-orang baik di Kayo Pulau sebagai lokasi utama dan di Jayapura umumnya, ternyata batasan etnik tidak dibatasi oleh teritorial, melainkan lebih pada jalinan relasi sosial yang terjalin. Hal ini terlihat dalam hal relasi antar-kelompok etnik Kayo Pulau dan kelompok etnik lainnya di Kota Jayapura. Di sini orang Kayo Pulau membangun relasi dengan kelompok etnik lainnya, dalam empat konteks, yakni kekerabatan, ekonomi, politik dan keagamaan.

Artikel ini meskipun tetap memperhatikan apa yang disampaikan oleh Eriksen yang memperhatikan proses historis di masa lalu. Namun demikian dapat dikatakan, di Kota Jayapura proses masyarakat polietnik masih terus berlangsung, jadi meskipun kajian historis, seperti yang dikemukakan Eriksen penting, namun bukan semata-mata di masa lalu, karena proses itu bahkan terus berlangsung di masa kini. Tidak sampai di situ saja, kajian ini lebih jauh menambahkan situasi masyarakat polietnik di Jayapura, dengan memperhatikan proses-proses relasi di empat konteks yang menjadi hal yang penting. Jadi saya mengajukan fokus yang lain, yakni pada konteks kekerabatan, ekonomi, politik dan keagamaan yang menjadi kontribusi saya.

Relasi dalam konteks kekerabatan

Relasi etnik dalam konteks kekerabatan, di mana orang Kayo Pulau membangun relasi dan menjaga relasi dengan etnik di sekitarnya. Mereka menerima dan menjalin relasi dengan etnik manapun, tanpa memandang bulu, baik etnik pada rumpun suku-suku di Papua sendiri, maupun etnik non-Papua. Sebagai contoh di tengah himpitan dan tekanan penduduk dari luar yang telah menguasai hampir seluruh areal lahan hidup mereka, hingga saat ini mereka masih memberikan tempat tinggal (lokasi) gratis bagi kelompok etnik Serui-Ambai di wilayah Argapura Laut (kampung Vietnam) yang sudah hidup di

situ lebih dari 40-an tahun. Demikianpun, Pulau Kosong (*Muturau Mutugu*) yang sudah ditinggali oleh orang Buton selama 50 tahun, yakni sejak tahun 1968, tanpa membayar sepeser pun. Meskipun pada tahun 1982/1983 karena padatnya penduduk di kampung Kayo Pulau, sekitar 25-30 KK orang Kayo Pulau harus ditrasmigrasikan (translok) ke daerah Koya Barat, distrik Muara Tami Kota Jayapura, yang dekat dengan negara PNG.

Pada tahun 2004 ketika Ondoafi Gasper Sibi dipukul oleh seorang pemuda mabuk dari wilayah kampung Vietnam (Argapura Laut). Pada waktu itu diselenggarakan sidang Mahkamah adat Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port-Numbay yang dihadiri oleh 12 keondoafian dari suku-suku pemilik Kota Jayapura. Sidang yang digelar dengan sebutan “Mahkamah Adat” itu, telah memutuskan bahwa dalam waktu tiga bulan, sebanyak 58 KK dari kelompok etnik Serui-Ambai di Argapura Laut (kampung Vietnam) harus mengosongkan tempat tersebut. Namun demikian, hingga saat ini tahun 2019, tak satu-pun keluarga dari 58 keluarga di situ yang diusir. Di sini terlihat bagaimana relasi kekerabatan yang terjalin dapat mengalahkan sebuah keputusan adat dari 12 keondoafian di Kota itu.

Relasi kekerabatan juga diperkuat terutama oleh kaum perempuan yang dijuluki sebagai noken dari keluarga (noken bagi laki-laki). Kaum perempuan yang kawin dengan laki-laki di luar rumpun etnik Kayo Pulau, (“kawin keluar”) membentuk kelompok yang disebut, “Ikatan Perempuan Kayo Pulau Kawin Keluar”. Ikatan ini dibentuk sebagai salah satu lembaga mandiri guna menopang berbagai aktivitas sosial di Kampung Kayo Pulau, dan, atau dengan kampung-kampung asli lainnya di Port-Numbay-Kota Jayapura. Tidak hanya itu, relasi kekerabatan yang pernah dibangun oleh orang tua mereka di daerah lain dalam hubungan perkawinan, sebagai contoh keluarga Sibi dari Manado tetap dijaga dan diperkuat. Pada tahun 2014, keluarga Sibi di Jayapura mengirim uang kepada keluarga Sibi di Manado⁸, dan sebanyak

tujuh orang anggota keluarga Sibi datang dengan kapal di Kota Jayapura.

Relasi dalam konteks ekonomi

Relasi antar-etnik dalam konteks ekonomi, di mana jika melihat kembali pada masa lalu, ekonomi tradisional orang Kayo Pulau dan rumpun etnik lainnya di sekitar teluk Humboldt dan Youtefa, ketika itu mereka hidup dalam sistem ekonomi tradisional, seperti meramu, menangkap ikan, berburu, bercocok-tanam dan barter. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sesungguhnya bukanlah hal yang rumit dan sulit, karena segala sesuatu untuk kebutuhannya sudah tersedia di alam. Namun demikian, ada sebuah alat bayar dan juga sebagai maskawin (*brideprice*) ketika itu dan masih dipakai hingga kini yang disebut manik-manik (*semboni* atau *siboni* atau *tambosa*) yang merupakan milik pribadi, tetapi juga bisa menjadi milik komunal, bagian dari harta kampung. Manik-manik sebagai alat bayar dan juga sebagai maskawin, berasal dari wilayah barat Indonesia, yakni Timor, Seram dan Borneo (Kalimantan). Untuk mendapatkan barang yang bukan hasil produksi masyarakat sendiri, tentunya mereka harus membangun relasi dengan orang luar.

Perkembangan lebih lanjut sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ketika rumpun etnik asli di Kota Jayapura mulai berkenalan dengan para pedagang dari Eropa dan orang Indonesia (Ternate) yang adalah pedagang burung cenderawasih. Para pedagang burung cenderawasih tersebut memperkenalkan uang sebagai alat bayar yang baru. Di masa-masa sebelum Perang Dunia Kedua berlangsung, mereka diperkenalkan dengan toko-toko kecil yang dikelola oleh orang Cina dan orang Arab. Ketika itu uang sudah mulai beredar cukup luas, dan mereka harus berusaha mendapatkannya. Hasil tangkapan ikan dijual, kemudian dipakai membeli beras, teh, kopi, gula, garam, vetsin, rokok, dan lain-lain.

⁸ Keluarga Sibi dari Manado, di mana menurut ceritera, dahulu ada seorang laki-laki dari keluarga Sibi yang berangkat sampai ke Halmahera dan melanjutkan perjalanannya hingga ke Manado. Ia kawin di sana dan

keturunannya hidup di sana. Meskipun keluarga Sibi di Manado secara fisik berbeda dengan mereka yang di Jayapura, tetapi relasi antar-kedua keluarga ini terus dipelihara.

Kini orang Kayo Pulau dan rumpun etnik asli lainnya di Kota Jayapura telah berada dalam dunia kapitalis yang kompleks dengan persaingan yang luas pula. Di lain sisi, sumber daya andalan hidup mereka di masa nenek moyang sudah tidak ada lagi. Kebutuhan hidup mereka meningkat seiring dengan perkembangan jaman, dengan berbagai produk baru yang ditawarkan mulai dari makanan, pakaian, perumahan, perabot perumahan, hingga berbagai variasi gaya hidup generasi milineal ala dunia maya. Mereka harus mampu bertahan hidup di tengah berbagai perkembangan, maka pilihannya membangun relasi sosial.

Orang Buton di Pulau Kosong (*Muturau mutugu*), di musim-musim tertentu di mana ikan cukup berlimpah, para nelayan dari kampung Buton tersebut datang ke Kayo Pulau, tepatnya di jembatan Kayo Pulau, sambil berteriak ikan-ikan dan meletakkan sejumlah ekor ikan di situ. Warga Kayo Pulau siapapun silahkan mengambilnya. Begitu juga, orang Serui-Ambai di Kampung Vietnam yang sering menggunakan bahan peledak, bom atau *dopis* untuk membunuh ikan. Jika bom diledakkan di laut dan ikan terbunuh, orang Kayo Pulau pun datang mengambil ikan tersebut bersama-sama dengan si-peledak bom (*dopis*) dari kampung Vietnam, Argapura Laut.

Dalam dua hal peristiwa penting kehidupan, yakni perkawinan dan kematian, ketika kebutuhan ekonomi meningkat baik uang, maupun berbagai kebutuhan materi lainnya, di situ relasi orang Kayo Pulau dengan etnik lainnya sangatlah menentukan. Pada peristiwa perkawinan dan kematian, misalnya dalam acara “buka meja” si pemilik hajatan akan mengundang sejumlah orang dari etnik dan agama apapun guna memenuhi undangan. Para tamu undangan itu datang dengan membawa “pemberian”, berupa uang, maupun benda. Sebagai contoh dalam hal meminang seorang perempuan, pihak laki-laki akan mengadakan acara “buka meja” bagi para tamu undangan guna mendapat dukungan bagi pembayaran maskawin, yang akan diserahkan kepada pihak perempuan. Pemberian dari para tamu undangan akan dicatat sebagai bagian dari kebaikan orang tersebut.

Selain itu dalam hal kedukaan, setelah pemakaman berlangsung beberapa waktu kemudian, keluarga yang berduka mengadakan acara “buka meja”, untuk membalas kembali pemberian dari keluarga lainnya yang membantu di saat kedukaan lalu. Sebagai contoh, nilai ekonomi berupa uang dan benda dalam “buka meja” untuk kedukaan, yang diselenggarakan oleh seorang bapak E.Y, atas kematian isterinya. Buka meja yang berlangsung selama dua hari terkumpul uang tunai sebesar Rp 30.450.000, (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah dengan benda-benda berupa 20 manik-manik, setengah lusin piring makan dan tiga buah piring besar.

Sedangkan pada peristiwa “buka meja” untuk pembayaran maskawin, yang dilakukan selama dua hari, guna mengumpulkan maskawin bagi seorang pemuda bernama M.Y. di Kampung Argapura Laut (kampung Vietnam) diperoleh uang sebesar Rp 36.500.000 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), ditambah sejumlah benda maskawin lainnya, yakni tomako batu (kapak batu) 5 buah, manik-manik 36 buah, dan piring besar 28 buah. Jika dibandingkan kelompok orang yang datang memberi, bisa diperkirakan 30% orang asli Kayo Pulau dan 70 % orang non Kayo Pulau.

Relasi dalam konteks politik

Orang Kayo Pulau dan rumpun etnik asli lainnya di Kota Jayapura, memiliki tipikal politik tradisional yang unik, di mana mereka tergolong dalam tipe politik kepala klen atau ondoafi (Mansoben, 1995). Jika mengacu pada pendapat NH Fried, mereka dapat dikategorikan pada masyarakat dengan tipe *rank societies*, (Koentjaraningrat, 1990:199). Pada masyarakat tipe ini seorang pemimpin yang disebut ondoafi memimpin sejumlah klen di suatu wilayah, dengan teritorial yang terbatas. Adapun status seorang ondoafi dan para pemimpin klen melalui pewarisan (*ascribed status*) dan memiliki otonomi atas wilayah, sumber daya alam dan atas rumpun etnik tersebut, serta klen-klennya. Ini berbeda dengan tipe kerajaan misalnya, di mana seorang raja mengatur suatu wilayah yang luas, bukan

hanya beberapa klen saja, melainkan sejumlah suku dan bahasa yang beragam.

Situasi politik tradisional yang *ascribed status* dan otonom tersebut, kini berhadapan dengan sistem politik modern yang bukan lagi diwariskan, melainkan diusahakan dan dicapai (*achieved status*). Maka relasi politik untuk mendapat dukungan massa bagi seorang politikus amatlah penting. Lokasi-lokasi “hibah” kepada orang luar menjadi lokasi-lokasi yang paling diperebutkan oleh tokoh-tokoh politik Kayo Pulau untuk mendulang suara di situ. Setiap orang harus menggunakan kapasitas relasinya dengan individu dari etnik lainnya untuk menentukan masa depan karir politiknya. Apalagi hari ini, di kampung Kayo Pulau sendiri penduduk asli 24,6 persen selebihnya adalah kelompok migran yang umumnya dari daerah Buton di Sulawesi Tenggara.

Seorang anggota dewan Kota Jayapura asli kampung Kayo Pulau, pada pemilu legislatif tahun 2014 lalu, sempat mendulang suara yang besar di dua tempat, yakni di Pulau Kosong dan kampung Vietnam. Ia juga adalah seorang kepala klen dari salah satu dari empat kepala klen di kampung Kayo Pulau. Ia satu-satunya adalah orang asli Kayo Pulau yang duduk di kursi DPRD Kota Jayapura periode 2014-2019. Demikian pun tokoh-tokoh politik asli Port-Numbay (Kota Jayapura). Mereka membangun relasi dalam kemajemukan dan senantiasa tampil dalam simbol kemajemukan, omongannya juga membangun sentimen dirinya dengan kelompok manapun dan golongan manapun. Demikian pidato-pidatonya selalu bernuansa kemajemukan. Di sini jelas dapat dicermati, kelompok etnik asli di Kota Jayapura, senantiasa mempertimbangkan relasi etnik dalam kaitan dengan konteks politik.

Namun demikian, mencermati politik Pilkada dan pemilihan umum di Indonesia pasca reformasi, di mana politik identitas terasa sangat kuat. Maka sudah saatnya dalam konteks NKRI yang begitu polietnik, perlu ada kebijakan afirmatif bagi penduduk asli agar mereka tetap menjadi tuan di negerinya, menjadi pemimpin politik di negerinya. Merupakan wujud dari ungkapan “di mana tanah dipijak di situ langit dijunjung”. Dengan demikian, kehadiran pemimpin yang berasal dari penduduk asli setempat, juga dapat memberikan pengaruh kultural, di mana kearifan

lokal yang membangun dan merangkul menjadi energi dan lokomotif bagi pembangunan di daerah tersebut.

Relasi dalam konteks keagamaan

Rumpun suku-suku di wilayah teluk Humboldt dan Youtefa percaya kepada *tab* (matahari) sebagai penguasa dan pencipta dunia. Namun demikian, ketika mereka berjumpa dengan para zendeling (misionaris) yang masuk ke daerahnya, tidak terlalu lama kemudian, mereka membangun relasi baru dalam sistem kepercayaan yang baru. Ketika Injil masuk ke wilayah Humboldt dan sekitarnya, rumah-rumah karwari (rumah dewa) yang di dalamnya tersimpan berbagai benda sakti, seperti suling sakti, dan tifa sakti ditinggalkan. Relasi penduduk dengan agama Kristen, dapat dicermati paling tidak dalam empat hal. *Pertama*, bagaimana mereka memaknai relasi antar-para dewa dan mengakui siapa dewa yang tertinggi. Sebagai contoh, ceritera seorang tokoh masyarakat bernama Lodwik Hamadi, di mana ketika seorang zendeling bernama Van Hasselt bertemu dengan para pemimpin kelompok etnik Tobati, salah satu rumpun suku di teluk Humboldt. Pada waktu itu terjadi perdebatan antar-para pemimpin suku dengan Van Hasselt mengenai relasi dewa, dan dewa siapa yang menduduki posisi tertinggi. Van Hasselt kemudian membacakan Kitab Injil mengenai penciptaan. Di dalamnya matahari (*tab*) yang menjadi dewa orang Tobati dan rumpun kelompok etnik di teluk Humboldt dan Youtefa sesungguhnya diciptakan oleh dewanya Van Hasselt, yakni Tuhan Allah. *Kedua*, konsep keselamatan yang ditawarkan oleh zendeling juga lebih konkrit, karena tidak hanya bicara tentang Tuhan, tetapi berbagai persoalan lain, seperti kesembuhan dari penyakit lewat program pengobatan zendeling. *Ketiga*, relasi dengan orang asing kulit putih, yang adalah misionaris, terjadi dengan mudah karena dianggap memiliki hubungan keluarga, berkaitan dengan mitologi kargoisme. Zendeling Van Hasselt asal Belanda berceritera, ia dipeluk oleh seorang nenek di daerah Armopa (daerah di Kabupaten Sarmi), karena si nenek menganggapnya sebagai anak lelakinya yang telah meninggal dunia dan kembali (Kamma, 1993:365-366). *Keempat*,

penghormatan terhadap orang tua di dalam budaya orang di teluk Humboldt yang juga diajarkan oleh Injil.

Relasi dalam konteks keagamaan tidak hanya dengan agama Kristen, sikap menjalin relasi yang baik juga dinyatakan oleh para pemimpin di daerah ini. Para ondoafi memberikan ruang bagi ekspresi keagamaan, di mana sejumlah bangunan masjid berdiri megah di Kota Jayapura. Terdapat Masjid Raya di Kota Jayapura, dan sejumlah masjid megah lainnya di daerah Kotaraja, Abepura, Hamadi, Entrop, Waena, dan Koya. Bahkan di atas Pulau Kosong (*Muturau mutugu*) milik orang Kayo Pulau yang sudah dihuni orang Buton selama lebih 50 tahun, berdiri pula sebuah mesjid yang bangunannya dapat dilihat dengan jelas dari Kota Jayapura. Demikianpun, rumah ibadah Wihara dan Pura, milik umat Hindu dan Budha yang berdiri megah di sekitar daerah Skyline Kota Jayapura.

Pada HUT Kota Jayapura yang ke-106, walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano mengundang ustad kondang, Ustad Maulana datang berkhotbah memberikan pencerahan bagi umat Muslim di Kota ini. Acara siraman rohani yang berlangsung di GOR Waringin Kotaraja Jayapura itu dihadiri oleh Sang Walikota. Demikian pun relasi dalam konteks keagamaan, khususnya duet kepemimpinan yang seimbang yang merepresentasikan antara-umat Kristen dan Muslim sebagai simbol kemajemukan ditampakkan pada kepemimpinan Benhur Tomi Mano. Hal ini terlihat di mana wakil walikota, Nur Alam, di akhir periode kepemimpinannya, di mana ketika buka puasa tahun 2016 bersama dengan walikota Jayapura Benhur Tomi Mano di Masjid Hamadi, ia menyatakan dirinya pamit dan tidak mencalonkan dirinya kembali sebagai wakil walikota bersama Benhur Tomi Mano. Namun, ketika itu ia meminta agar Benhur Tomi Mano dalam periode keduanya, hendaknya mengambil seorang muslim sebagai wakilnya. Ketika itu langsung dijawab dengan tegas oleh Benhur Tomi Mano, bahwa calon wakilnya adalah seorang Muslim. Dan memang benar, kini Benhur Tomi Mano dalam periode keduanya (2017-2022) memimpin bersama wakilnya, seorang Muslim asal Bugis, bernama Haji Ir.Rustam Saru.

SIMPULAN

Di sini terlihat jelas bahwa identitas baik etnik maupun agama tidak dapat dibatasi oleh teritorial. Bukan juga sesuatu yang askriptif, diwariskan, kaku dan tidak bisa berubah, tetapi sesuatu yang *fluid*, mencair, didasarkan pada relasi dan konstruksi sosial. Demikian, identitas etnik tidak dapat dilihat hanya pada asal-usulnya (*roots*), tetapi sebaiknya pada perjalanannya (*route*-nya). Identitas juga bisa dinegosiasikan berdasarkan kategori-kategori.

Dalam kehidupan orang Kayo Pulau dan penduduk asli Kota Jayapura, di mana praktik-praktik budaya, seperti acara “buka meja” bagi sebuah hajatan perkawinan, maupun kematian menunjukkan ciri inklusif. Hal ini terlihat dari sikap mencari persamaan dan merangkul dari penduduk asli terhadap kelompok etnik lainnya. Sifat inklusif tersebut memudahkan siapa saja masuk ke sana dan menjadi bagian dari mereka. Seperti ungkapan keluarga pemilik hajatan “buka meja” jika ditanya orang yang datang memberi sumbangan, meskipun nampak jelas orang-orang tersebut bukan dari suku setempat, namn sang pemilik hajatan akan menjawab bahwa “*ini semua keluarga*”.

Ungkapan seorang ibu A.S, ketika menerima keluarganya yakni keluarga Sibi yang datang dari Manado, katanya : “*Mereka yang datang jangan dilihat dari kulit dan rambut yang berbeda, tetapi ketika mereka sudah tiba di pelabuhan Jayapura, mereka adalah orang Kayo Pulau asli*”.

Terlihat jelas bahwa identitas itu cair (*fluid*) sifatnya, tidak kaku. Seperti pendapat Eriksen (2010:215) identitas itu pada hakekatnya memperoleh bentuk-bentuk yang berbeda dan mungkin juga muncul dari situasi sejarah yang berbeda. Sebagaimana Ger Baumann (1999) mengatakan, semua identitas adalah bagian dari identifikasi, demikianpun David McCroner mengatakan ‘identitas seharusnya dilihat sebagai suatu hal mengenai “*route*” (perjalanan) dari pada “*roots*” (akar/asal-usul), sebagai peta-peta untuk masa depan dari pada jejak-jejak dari masa lampau.

Barth (1988) memandang kelompok etnik sebagai unit-unit kebudayaan dan kelompok etnik sebagai suatu tatanan. Baginya hubungan

antar-kelompok etnik yang dinamis dapat dilihat pada studi akulturasi, selain itu perlu kajian mengenai etno-histori, hal ini sebagai akibat bahwa pembentukan suatu budaya sesungguhnya amat beragam, terutama dalam hal pertambahan maupun perubahan budaya. Kelompok etnik bukan semata-mata ditentukan oleh wilayah, teritorial. Akan tetapi, batasan etnik meliputi batasan sosial yang bersifat sangat kompleks. Akhirnya, artikel ini, coba mencermati relasi sosial dari empat aspek kehidupan manusia, yakni aspek kekerabatan, ekonomi, politik dan keagamaan, di mana sesungguhnya dalam kasus orang Kayo Pulau dan kelompok etnik lainnya di Jayapura, serta Papua umumnya keempat aspek tersebut sangatlah penting.

PUSTAKA ACUAN

- Barth, F. (1988). *Kelompok Etnik dan Batasannya, Tatahan Sosial dari Perbedaan Kebudayaan*. Jakarta: UI Press.
- Barth, F. (1987). *Cosmologies In The Making, A Generative Approach to Cultural Variation in Inner New Guinea*. Cambridge University Press.
- Barth, F. (1969). *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Oslo:Universitetsforlaget
- Bayar, M. (2009). Reconsidering primordialism : an alternative approach to the study of ethnicity, *Ethnic and Racial Studies*: 32 (9) November: 1639-1657.
- Boelaars, J. (1992). *Manusia Irian, Dahulu-Sekarang-Masa Depan*, Jakarta: Penerbit Pt. Gramedia Pustaka Utama
- Cohen, A. (1982). A Polyethnic London Carnival as a Contested Cultural Performance, *Ethnic and Racial Studies*, 5 (1), 23-41.
- Eriksen, T. H. (2010) *Etnicity and Nationalism, Anthropological Perspectives*, Third Edition, Pluto Press, London.
- Furnivall, J.S. (1967). *Netherlands India, A Study of Plural Economy*. Cambridge At the University Press.
- Galis, K.W. (1955). *Papua's Van De Humboldt—Baai* (Terjemahan, belum diterbitkan)
- Gupta, A. (1995). Blurred boundaries: the discourse of corruption, the culture of politics, and the imagined state. *American ethnologist*, 22(2), 375-402.
- Hansen, T. B & Stepputat, F. (Eds). (2001) *State of Imagination (Ethnographic Exploration of the Postcolonial State)*. Durham dan London:, Duke University Press.
- Karner, C. (2007). *Etnicity and Everyday Life*. London and Newyork: Routledge.
- Keessing, R. M. (1992) *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer* (edisi terjemahan). Jakarta: Penerbit Airlangga.
- Koentjaraningrat. (1990). *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: UI Press.
- Koentjaraningrat. (1993). *Irian Jaya Membangun masyarakat Majemuk*. Jakarta: Djambatan.
- Koentjaraningrat & Bachtiar, H. W. (1963). *Penduduk Irian Barat*, Penerbitan Universitas, Jakarta.
- Lekitoo, H. Y. (2012). *Potret Manusia Pohon (Komunitas Adat Terpencil Suku Korowai di daerah Selatan Papua dan Tantangannya memasuki Peradaban baru)*. Jakarta: ILPOS.
- Lekitoo, H. Y. (2006). *Elit Masyarakat Kaum Imigran dan Struktur Masyarakat* (dalam Fenomena dan Dampak Migrasi di Kawasan Teluk Bintuni). Laporan Penelitian, Jurusan Antropologi FISIP UNCEN Kerjasama dengan BP-LNG Tangguh.
- Lekitoo, H. Y. (2005). *Geliat Anak Negeri Port Numbay dalam Pemilihan Langsung (Pertama) Walikota-Wakil Walikota Jayapura*. Laporan Hasil penelitian,
- Lekitoo, H. Y. (2004). *Catatan Sidang Mahkamah Adat, Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port-Numbay, Terhadap Pemukulan Ondoafi Gasper Sibi*.Laporan Hasil penelitian,
- Lekitoo, H. Y & Poli, I. (2008). *Geliat Ekonomi pedagang Kelapa Orang Asli Papua di Skyland, Kota Jayapura* (laporan penelitian dibiayai DIPA UNCEN).
- Lekitoo, H. Y. (Ed). (2012). *Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Masyarakat di Kampung Enggros (Kota Jayapura), Kampung Salor (Kabupaten Merauke) dan Kampung Yafdas (Kabupaten Biak) Provinsi Papua*. Laporan Penelitian Kerjasama Oxford Policy Management Limited (OPML) dengan Lab. Sosio UI. (Hasil Penelitian)
- Lewellen, T.C. (2002). *Political Anthropology : An Introduction, Third Edition*, Praeger publishers.
- Malinowski, B. (1988). *Tertib Hukum Dalam Masyarakat Terasing* (Alih Bahasa oleh A.G.Soekadji), Penerbit Airlangga, Jakarta.
- Mampiooper, A. (1972). *Jayapura Ketika Perang Pasifik*
- Mansoben, J. R. (1995). *Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya*. Jakarta: LIPI-RUL.

- Maunati, Y. (2000) *Contesting Dayak Identity, Commodification and The Cultural Politics of Identity in East Kalimantan* (Disertasi).
- Mauss, M. (1992). *Pemberian, Bentuk dan Fungsi Pertukaran di Masyarakat Kuno* (Pengantar dan Penerjemah: Parsudi Suparlan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miller, R. & Feagin, J. R. (2007). The Reality and Impact of Legal Segregation in the United States. Dalam H. Vera and J. R. Feagin (Eds). *Hand Book Of the Sociology Of Racial And Ethnic Relations*. Edited by Springer.
- Peletz, G.M. (1994) Comparative Perspectives On Kinship and Cultural Identity in Negeri Sembilan. *Sojourn 9(1)*: 1-53
- Purwanto, S. A & Sembiring, S.A. (2015). *Nilai Budaya Agraris ARON, Gotong Royong Pada Komunitas Petani Sayur di Berastagi* (Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya-Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan), Jakarta.
- Richardson, D. (1974). *Anak Perdamaian (Kisah Penghianatan yang luar biasa di antara suku bangsa primitif pada abad kedua puluh)*. Bandung: Yayasan Kalam Hidup,
- Rudyansjah, T. (2009). *Kekuasaan, Sejarah & Tindakan : Sebuah Kajian tentang Lanskap Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rutherford, D. (2001). *Intimacy and Alienation : Money and the Foreign in Biak*, (dalam Public Culture 13 (2): 299-324), Duke University Press.
- Saetersdal, T. (1999). Symbols of Cultural Identity : A Case Study from Tanzania. *African Archaeological Review 16(2)*.
- Schoorl, J. W., & Aditjondro, G. J. (2001). *Belanda di Irian Jaya: amtenar di masa penuh gejolak 1945-1962*. Jakarta: Perwakilan KITLV.
- Scott, J.C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance*. Hidden Transcripts, Yale University.
- Shahab, Y. Z. (2004). *Identitas dan Otoritas, Rekonstruksi Tradisi Betawi*. Depok: Laboratorium Antropologi FISIP UI.
- Suparlan, P. (2005). *Suku Bangsa dan Hubungan Antar-Suku Bangsa*, Edisi Revisi-Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK) Press.
- Suparlan, P. (2001). *Bhineka Tunggal Ika: Keanekaragaman Suku Bangsa atau Kebudayaan?* (Makalah Seminar 'Menuju Indonesai Baru').
- Sutton, R. A. (1995). Performing Arts and Cultural Politics in South Sulawesi. *Bijdragen tot de Taal, Land-end Volkenkunde, Deel 151, 4de Afl*. Published by Brill.
- Timmer, J. (2014). *Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elite di Papua* (dalam Politik Lokal di Indonesia, Editor : Henk Schult Nordholt & Gerry van Klinken), Yayasan Pustaka Obor Indonesia, KITLV-Jakarta.
- SKP Jayapura. (2008). *Membangun Budaya Damai dan Rekonsiliasi, Dasar Menangani Konflik di Papua*, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Jayapura.
- Van Hasselt, F.J.F. (2002). *Di Tanah Orang Papua* (Edisi terjemahan oleh Zeth Rumere dan Ot.Loupatty). Wamena: Yayasan Timotius Papua bekerjasama dengan yayasan HAPIN Belanda.
- Van Baal, J. (1987). *Sejarah dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya* (Hingga Dekade 1970), Jilid I. Jakarta: Gramedia.
- Wandosa, Y. B. (2007). "Mrec" Damai di Bawah Ketiak Ondoafi (Tesis pada Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik –UGM Yogyakarta).
- Widjojo, M. S.W (Ed.). (2008). *Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: LIPI.
- Wills, W. H. (2009). *Cultural Identity and the Archaeological Construction of Historical Narratives : An Example from Chaco Canyon*. Berlin: Springer Science + Business Media, LLC 2009.
- Yagi, N & Kleinberg, J. (2011). Boundary work : An interpretive ethnographic perspective on negotiating and leveraging cross-cultural identity. *Journal of International Business Studies*, 42(5) Qualitative Research in International Business (June/July 2011: 629-653).